

	News Title : Polemik OJK Larang Perbankan Fasilitas Aset Kripto padahal Sudah Diakui Bappebti	
	Media Name : Neraca	Journalist : bari
	Publish Date : 09 February 2022	Tonality : Positive
	News Page : 5	News Value : 29,520,000
	Resources : Nailul Huda (Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF))	Ads Value : 9,840,000
	Section/Rubrication : Bursa Finansial	Topic : kripto

Polemik OJK Larang Perbankan Fasilitas Aset Kripto padahal Sudah Diakui Bappebti

Jakarta – Pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait pelarangan pihak perbankan memfasilitasi transaksi kripto menuai kritik. Pasalnya, kripto telah dikukuhkan sebagai salah satu komoditas yang diperdagangkan dengan pengawasan di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

■ NERACA

OJK telah meminta kepada industri perbankan agar penggunaan rekening bank tidak dijadikan sebagai penampung dana dari kegiatan melanggar hukum, termasuk kripto. Hal itu merupakan buntut dari maraknya penipuan investasi dan kejahatan bermodus skema ponzi. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda, menilai pernyataan OJK itu menandakan adanya ketidakselarasan antar instansi pemerintah.

Pasalnya, kripto sendiri telah dirancang sebagai komoditas oleh Bappebti di

bawah Kemendag.

Tidak hanya itu, Bappebti juga telah merancang aturan terkait perdagangan dan pedagang kripto secara resmi. Artinya, selama transaksi dilakukan oleh pedagang kripto terdaftar dan diawasi Bappebti, skema perdagangan kripto layaknya komoditas ataupun produk derivatif lainnya.

“Di satu sisi Bappebti berupaya memfasilitasi industri ini, tapi di sisi lain ada institusi lain yang punya pandangan lain. OJK dan Bappebti ini ngobrol dulu lah, tren aset kripto ini kan sudah jalan beberapa tahun terakhir,” ungkap Nailul, seperti dikutip dalam keteran-

gan, Selasa (8/2).

Dilain sisi, dia memahami sudut pandang OJK yang masih mempersepsikan bahwa aset kripto berpotensi sebagai alat tukar layaknya uang fiat, karena namanya adalah cryptocurrency.

Sedangkan alat tukar resmi adalah Rupiah sebagaimana diatur perundang-undangan. “Tapi kan sejak awal ketika Bappebti memfasilitasinya, kesepakatan hanya di Indonesia hanya boleh digunakan sebagai aset investasi. Bukan alat transaksi,” jelasnya. Karena itu, dia menilai ada kejanggalan dengan imbauan dari otoritas agar perbankan tidak memfasilitasi transaksi aset kripto, padahal sejak awal Bappebti merumuskan kripto sebagai komoditas investasi.

“Bagaimana bisa investor membeli atau berinvestasi aset kripto kalau tidak bisa menggunakan rekening bank sebagai jembatan untuk beli atau jual aset kripto ke pedagang kriptonya? Kan ini aset digital, masa iya beli dan jualnya lewat peda-

gang langsung secara offline,” tegas Nailul.

Lebih jauh, dia sepakat bahwa otoritas dan Satgas Waspada Investasi (SWI) berhak melarang sejauh perdagangan itu bersifat ilegal, termasuk dilakukan oleh pedagang kripto yang tidak terdaftar. “Selama ini Bappebti sudah merilis mana saja pedagang kripto dan koin kripto yang terdaftar dan berizin resmi di Bappebti. Seharusnya itu sudah cukup jadi acuan untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan keterlibatan bank,” tambah Nailul.

Dia mengatakan bahwa OJK berhak dan berwenang mengatur dan melarang perbankan dalam ekosistem aset kripto, dalam hal penempatan dana bank ke dalam bentuk aset kripto. Sebab, kata Nailul, karena dana di bank adalah dana masyarakat. “Mereka tidak boleh main-main menempatkan dana nasabahnya, terutama di aset yang punya fluktuasi tinggi,” simpulnya. ● bari